

**KEPENTINGAN INDONESIA MELAKUKAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN TIONGKOK PADA MASA
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2014 – 2019**

Oleh: Vrastian Darulingga

Email: vrastiandarulingga@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau 28293

Telp/Fax: 07561-63277

ABSTRACT

This research discusses Indonesia's interests in infrastructure development cooperation in Indonesia with China in 2014 - 2019. Currently Indonesia is a country that is trying to improve the development of its country. One of the developments that Indonesia is intensifying is development in the infrastructure sector. In carrying out this effort, China is a country that is cooperated by Indonesia.

This study explains the overview of infrastructure development in Indonesia, the strategic value of China for Indonesia, and the Indonesian government's policy in conducting infrastructure development cooperation with China. The data in this study were obtained through books, journal articles, documents (government output) and websites.

Indonesia in conducting infrastructure cooperation with China is due to the dependence factor with China to meet the needs of Indonesia's infrastructure development efforts. This is evidenced by the financial and labor assistance provided by China.

Keywords: Cooperation, infrastructure development, dependence, funds.

PENDAHULUAN

. Berbagai negara di dunia akan cenderung untuk melakukan pembangunan untuk negaranya sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini berfokus kepada upaya untuk meningkatkan pembangunan di negaranya. Salah satu bentuk pembangunan yang saat ini paling digencarkan adalah pembangunan sector infrastruktur.

Hal tersebut bukanlah hal yang mengherankan karena, ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menjadi salah satu kunci sukses Indonesia dalam pemenuhan kepentingan-nya dalam UUD dasar 1945 dalam menyangkut kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya konsumsi masyarakat dan memicu atau mempercepat kegiatan produksi.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diartikan sebagai fasilitas publik yang meliputi jalan, rumah sakit, jembatan, air, telepon, tenaga listrik dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur, merupakan

wujud dari public capital yang dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah. *The World Bank* mengelompokkan infrastruktur menjadi tiga, yaitu infrastruktur ekonomi, sosial dan administrasi. Pembangunan infrastruktur yang baik di suatu negara mencerminkan kemajuan dan kemantapan negara itu menjadi suatu negara yang makmur, dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Dalam setiap pembangunan itu terdapat campur tangan dan bantuan dari negara lain yang dianggap dan patut dalam memberikan baik itu bantuan secara *riil* maupun secara *financial, investment* atau *loan*.

Salah satu negara yang turut berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah Tiongkok.¹ Sebelumnya hubungan diplomatik Indonesia- Tiongkok mengalami dinamika yang cukup panjang. Selama lebih dari 60 tahun, Indonesia dan Tiongkok saling mengenal satu sama lain. Hubungan kedua negara ini resmi di buka pada tanggal 28 Maret 1950, yaitu kurang lebih setahun setelah Tiongkok memproklamakan kemerdekaanya. Bertepatan pada tanggal 19 April

¹ Eudia Monica dan Sri Hadi, "Investasi China Dalam Bidang Infrastruktur Di Jawa Barat" Vol 1 (2013): 492, <http://ejournal.hi.xn--fisipunmul-ut6e.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/>.

1950, Indonesia-Tiongkok menjalin hubungan diplomatik. Kemudian lima tahun setelah itu dibentuk perhimpunan persahabatan Indonesia-Tiongkok pada tahun 1955. Peristiwa tersebut merupakan awal kerjasama antar kedua negara.²

Kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok bertujuan untuk mencapai ekonomi yang stabil dan menaikkan level ekonomi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainya. Langkah yang digunakan kedua negara dalam mengembangkan hubungan ekonomi ialah melalui Deklarasi Kemitraan Strategis yang telah disepakati pada 25 April 2005 oleh masing-masing pemimpin kedua negara. Dengan adanya MoU kesepakatan tersebut, menjadi pendorong yang kuat untuk mempererat hubungan kedua negara, selain itu target perdagangan dari sebesar US\$ 14,2 milyar, bahkan telah tercapai ditahun 2008 sebesar US\$ 31.5 milyar.³ Kemudian, adapun hasil yang telah dicapai Indonesia setelah disepakatinya Deklarasi Kemitraan Strategis yang telah dilaksanakan

tersebut, terkait pengembangan dan peningkatan ekonomi dan pembangunan bagi kedua negara yakni:⁴

1. MoU mengenai kerjasama dalam penanganan bersama mengenai dampak yang diakibatkan oleh bencana alam pada masing-masing negara terkait. (pada April 2005)
2. MoU pembentukan Cooperation Web Site of Indonesia-Tiongkok Economic and Trade Relation (pada Oktober 2006)
3. MoU kerjasama Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis. (pada Mei 2007)
4. MoU yang berfokus pada kerjasama dalam Cooperation in the Field of Population and Family Planning Reproductive Health. (pada Juli 2007)
5. MoU Anti Korupsi. (pada Mei 2007)
6. Kesepakatan ASEAN Tiongkok Framework Agreement dalam Food Safety. (pada 2008)

² Michella Desri Viollita, "Dampak Peningkatan Ekonomi Indonesia Melalui Deklarasi Kemitraan Strategis Dengan Cina Tahun 2005-2011" (Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2013).

³ Sudrajat, "Mengisi Kemitraan Strategi RI-RRT Dengan Berpartisipasi Pemangku Kepentingan Yang Lebih Luas," *Dubes LBBP-RI Untuk RRT*.

⁴ Rachmayanti, "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013)."

7. Terbangunya kerjasama investasi dengan semakin kuat, dan saling pengertian dalam pembangunan jaringan diantara otoritas investasi, pada sektor swasta, dan dengan terbentuknya iklim ekonomi, sosial, dan politik serta hukum yang kondusif bagi aliran investasi asing ke Indonesia. (pada tahun 2010)
8. Pertukaran study banding antara pelajar Indonesia-Tiongkok melalui kerjasama antar pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat umum dalam usaha untuk saling membagi strategis khusus untuk meningkatkan perekonomian masing-masing negara pada tahun 2011.

Pasca resmi menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo (Jokowi) mempersiapkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut termasuk ke dalam Nawacita yang digaungkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Alasan logis kenapa Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai alat utama pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur merupakan salah satu

faktor utama sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Pemilihan Tiongkok bukanlah hal yang mengejutkan dikarenakan Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia, menggeser hegemoni Amerika Serikat (AS) sejak Perang Dunia II, pada 2014 GDP (Gross Domestic Product) Tiongkok telah mencapai US\$ 18.976 milyar, berada di peringkat pertama dunia, sementara AS tergusur di posisi kedua dengan total GDP sebesar US\$ 18.125 milyar, ini pertama kalinya dalam sejarah ekonomi dunia modern, Tiongkok melampaui kekuatan ekonomi Amerika Serikat.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan dana besar untuk melakukan pembangunan dan perbaikan pembangunan yang telah tercapai sebelumnya. Kebutuhan dana ini tidak dapat diperoleh secara menyeluruh dari anggaran negara sehingga salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penyerapan dana melalui investasi asing maupun dalam negeri.

Kedekatan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok di era Jokowi dimanfaatkan dengan permintaan untuk membantu pendanaan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan Bandara, Kereta Cepat,

Jalan Raya, Bendungan, Pelabuhan dan sebagainya.

Permintaan ini kemudian disambut baik oleh Tiongkok dengan menambah nilai investasi ke Indonesia. Hal tersebut terbukti pada periode 2010-2014, nilai investasi yang masuk dari Tiongkok mencapai US\$ 1,5 miliar. Angka ini bila dirata-rata hanya US\$ 495 juta, bila dibandingkan dengan periode 2015, angkanya meningkat 26% menjadi US\$ 628 juta, kemudian kembali meningkat pada triwulan perta tahun 2016 dengan nilai total 464,6 juta dolar AS.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas: **Mengapa Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan Tiongkok?**

KERANGKA TEORI

Perspektif Liberalisme

Perspektif liberal adalah perspektif yang saling ketergantungan antara masyarakat dengan masyarakat, antara negara dengan negara sebagai bagian dari *human nature*. Bertolak dari sinilah berkembang dalam tradisi perspektif liberalisme suatu tesis; saling ketergantungan terutama pada sektor ekonomi mendorong negara untuk tetap menjaga kerjasama dan dengan begitu maka negara-negara akan mencegah diri dari situasi

konfliktual yang mengarah ke situasi perang terbuka.⁵ Hubungan ekonomi antara manusia sifatnya menyatukan, kekuatan pendamai dalam hubungan internasional.⁶ Cara berpikir inilah yang salah satunya ikut mewarnai perspektif liberalisme dalam hubungan internasional, terutama yang berhubungan dengan *interdependence liberalism*.⁷ Harmoni kepentingan menjadi dasar yang mendorong negara untuk saling bekerjasama, sekaligus menjadi mekanisme pencegahan atas terjadinya perang yang dianggap tindakan irasional.⁸

Teori Kerjasama Internasional

Untuk mewujudkan pola interaksi dalam hubungan internasional maka dilakukan sebuah bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan salah satu

⁵ Vinsensio Dugis, Liberalisme, diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio-Dugis/publication/321709080_Teori_Hubungan_Internasional_Perspektif-Perspektif-Klasik/links/5a7f16a80f7e9be137c71dbb/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Klasik.pdf

⁶ Walter, Andrew Wyatt, (1996), "Adam Smith and the Liberal Tradition in Intrnational Relations", dalam, Ian Clark & Iver B. Neumann, Classical Theories of International Relations, (eds.), Macmillan Press.

⁷ Jackson, R., & Sørensen, G., (1999), Introduction to International Relations, Oxford University Press.

⁸ Muller, Jerry Z., (1993), Adam Smith in his Time and Ours, Designing the Discent Society, Maxwell McMillan

ruang lingkup dari hubungan internasional yang memiliki makna sebagai suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional. Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini terjadi antara negara Indonesia dengan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan Indonesia khususnya dalam bidang infrastruktur.

Terkait mengenai kerjasama antar negara menurut J. Frankel dalam kerjasama antar negara masalah bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, akan tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu.⁹ Dalam melakukan kerjasama, sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama yaitu; pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Oleh karena, tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih

⁹ J. Frankel, Hubungan Internasional, Jakarta: ANS Sungguh Bersaudara, 1980, hal 102

tinggi dari komitmen. Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainya yaitu;¹⁰

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, banyak negara melakukan kerjasama dengan negara lainya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki ngara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan penurunan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap ngara lain.

Tingkat Analisa Negara Bangsa

Tingkat analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tingkat analisa Negara-Bangsa

¹⁰ Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal 16

(*Nation-State*). Pada level analisis ini, penjelasan tentang perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke, yang diperlukan ketika seorang peneliti menggunakan level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.¹¹

PEMBAHASAN

Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Kondisi infrastruktur Indonesia saat ini diklasifikasikan sebagai kondisi yang belum tercukupi dan tertinggal dari negara lain. Bagi Indonesia, negara dengan populasi dan wilayah kepulauan yang besar, pengembangan infrastruktur merupakan hal yang penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkesinambungan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur merupakan hal yang paling penting untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam *Global Competitiveness Report 2017-2018* yang disusun oleh Lembaga World Economic Forum,

¹¹ Olivia, Y, 2013, *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*, *Jurnal Transasional*, 5:1.

dalam bidang infrastruktur secara keseluruhan Indonesia menduduki peringkat ke-52 dari 137 negara dan posisi tersebut masih jauh dibandingkan dengan negara Singapura yang menduduki peringkat ke-2 dari 137 negara dan Malaysia yang menduduki peringkat ke-21 dari 137 negara. Selain itu, terdapat dua indikator yang membuat indeks daya saing Indonesia rendah, yaitu kualitas pelabuhan dan jalan (Schwab, 2015).

Penyediaan infrastruktur di Indonesia dinilai lamban karena kendala yang dihadapi pada berbagai tahapan proyek mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Kurangnya pembangunan infrastruktur maritim Indonesia yang menjadi faktor dalam tingginya biaya logistik negara. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai, biaya logistik di Indonesia merupakan biaya logistik paling tinggi di dunia yaitu mencapai 24% dari total PDB yaitu Rp 1.820 triliun per tahun. Dibandingkan dengan biaya logistik Malaysia yang hanya 15%, Thailand 16%, Singapura 15%, Amerika Serikat serta Jepang sebesar 10% (GBGIndonesia, 2018).

Dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia merasa pendanaan dari setiap proyek pembangunan infrastruktur yang ada merupakan salah satu kendala yang

dinilai paling berpengaruh besar. Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 4.796 triliun untuk mendanai keseluruhan pembangunan proyek infrastruktur selama tahun 2015- 2019. Akan tetapi, dari jumlah tersebut, hanya 40% dana yang sanggup disokong oleh APBN dan APBD. Sehingga dalam hal ini pemerintah membutuhkan pendanaan dari pihak BUMN dan pihak swasta. Pendanaan dari suatu pembangunan biasanya menggunakan anggaran yang bersifat konvensional seperti pendanaan yang didapatkan dari pendapatan negara atau daerah serta ada juga pendanaan yang bersifat non-konvensional seperti pendanaan yang berasal dari kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang dapat berupa penanaman modal atau investasi dalam bidang infrastruktur (Wibawati, Sari, & Sulistyani, 2018).

Nilai Strategis Tiongkok Bagi Indonesia

Kebangkitan China dari negara berkembang menjadi negara adidaya seperti saat ini menjadi perhatian dunia. Dari tahun 2009 hingga tahun 2015, produk domestik bruto (PDB) China mengalami peningkatan yang pesat. Pada 2009, PDB China berada pada angka USD \$ 5.05 triliun dan pada tahun 2015 meningkat menjadi USD \$ 10.886 triliun. Menurut Bank Dunia, China telah mencetak sejarah

ekspansi berkelanjutan tercepat dan telah mengangakat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan. Kebangkitan China tidak lepas dari peranan Presiden Deng Xiaoping yang melakukan reformasi ekonomi serta peranan Presiden Xi Jinping (Worldbank, 2019).

Sebelum tahun 1979, China merupakan negara berkembang yang miskin dengan segala permasalahannya. Pada masa kepemimpinan Mao Zedong, kondisi ekonomi China sangat tidak stabil. Ketidakstabilan ekonomi merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi marxisme, dimana aktivitas pasar terpusat pada satu kendali. Seluruh output ekonomi dikendalikan oleh negara, termasuk menetapkan tujuan produksi, mengendalikan harga dan mengalokasikan sumber daya di sebagian besar perekonomian. Tujuan utama pemerintah China adalah membuat ekonomi China relatif mandiri. Perdagangan luar negeri umumnya terbatas untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di China. Dengan adanya kebijakan tersebut menciptakan distorsi dalam perekonomian, karena sebagian besar aspek ekonomi dikelola oleh pemerintah pusat dan tidak ada mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pada saat itu, ekonom Agus Maddison menempatkan pertumbuhan

PDB tahunan China sekitar 9.7%. Selain itu, pada masa kepemimpinan Mao Zedong ekonomi China mengalami kemunduran yang signifikan (Maddison, 2007).

Akan tetapi, keadaan China berubah sejak tahun 1979, di bawah kepemimpinan Deng Xiao Ping. Kebangkitan China tidak lepas dari adanya kebijakan reformasi dan pintu terbuka (open door policy) yang dicetuskan oleh Presiden Deng Xiao Ping. Kebijakan tersebut telah mengubah seluruh sistem perekonomian China dari masa pemerintahan Mao Zedong yang menerapkan sistem ekonomi terpusat menjadi sistem ekonomi liberal di masa pemerintahan Deng Xiao Ping. Tujuan Presiden Deng Xiao Ping menerapkan reformasi ekonomi adalah untuk mengangkat perdagangan luar negeri China ke tingkat dan struktur yang sebanding dengan negara industri modern (Bohnet, Hong, & Muller, 1993). Melalui kebijakan pintu terbuka, Presiden Deng Xiao Ping mengambil beberapa langkah penting, yaitu:

1. Pemerintah telah mendesentralisasi pengambilan ekspor dan impor kepada pemerintah daerah atau perusahaan perdagangan luar negeri regional
2. Serangkaian zona ekonomi khusus dan kotakota pantai

terbuka telah dirancang untuk tujuan merangsang ekspor dan menarik investasi asing

3. Pembatasan administratif untuk ekspor dan impor telah diganti dengan sistem penetapan tarif, kuota dan lisensi
4. Kontrol terhadap valuta asing dilonggarkan, terutama untuk perusahaan yang dikelola oleh investor asing.

Melalui kebijakan tersebut, China berhasil meningkatkan PDB dari 9.7% pada tahun 1978 menjadi 26.8% pada tahun 1989 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, China juga berhasil meningkatkan investasi asing dari nilai USD \$ 1.7 miliar pada tahun 1983 menjadi USD \$ 11.4 miliar pada tahun 1991. Akumulasi investasi asing dari tahun 1979 sampai tahun 1992 mencapai USD \$ 34.5 miliar (Wei, 1995).

Kebangkitan China mencapai puncaknya pada masa Presiden Xi Jinping. Pada tanggal 29 November 2012 bertepatan dengan acara pameran bertema Jalan Kebangkitan, Presiden Xi Jinping menyampaikan pertama kali sebuah gagasan masa depan China yang disebut Impian China. Presiden Xi Jinping memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai gagasan tersebut dalam pidatonya pada acara penutupan Sidang Pertama Kongres Rakyat Nasional Tiongkok yang ke-12 di Beijing. Presiden Xi Jinping

menggambarkan impian tersebut sebagai pembaruan negara, perbaikan kehidupan masyarakat, kesejahteraan, penataan kehidupan sosial yang lebih baik dan penguatan militer (Hongyi & Xuemei, 2012).

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Melakukan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur dengan Tiongkok.

Peningkatan investasi China di Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak bisa dilepaskan dari proyek BRI. Proyek tersebut berfokus pada pengembangan jalur konektivitas, baik darat maupun laut via pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai negara yang didukung oleh China. Gambaran data di atas memperlihatkan betapa pentingnya China bagi Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Indonesia melihat munculnya peluang meningkatkan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya sekitar Rp 4.796 triliun dengan adanya BRI. Indonesia memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun infrastruktur di Tanah Air, termasuk pembangunan tol laut. Selain meningkatkan pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Jokowi, BRI juga sejalan dengan visi PMD. Sejumlah proyek yang dijalankan, antara lain pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan

Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Pembangunan pelabuhan ini bertujuan mendukung infrastruktur jalur laut dan meningkatkan infrastruktur juga logistik dalam kegiatan ekspor dan impor melalui jalur laut.

Pemilihan China dalam proyek pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Dari faktor eksternal yang pertama, mendekatnya Indonesia ke China tidak terlepas dari kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi global di abad-21, atau yang biasa dikenal dengan istilah fenomena the Rise of China. Kebangkitan China adalah gambaran menguatnya perekonomian China yang didorong oleh kebijakan ekonomi pintu terbuka yang dimulai di era Deng Xiao Ping (1978-1987).

Penerapan *open door policy* ini membawa China memasuki modernitas ekonomi pasar. Kebijakan ini membawa China mengalami transformasi besar-besaran dalam struktur perekonomiannya nasionalnya. Sebelum diterapkan kebijakan ekonomi terbuka, tepatnya pada tahun 1970 perdagangan ekspor China hanya mencapai 0.7 persen dari total dunia atau 12 persen dari PDB. Situasi berubah pasca 1978 dimana China menjadi salah satu negara dengan

perekonomian yang paling terbuka di dunia. Tarif impor China rata-rata turun dari 23.7 persen pada 2001 menjadi 5.7 persen pada 2011. Begitupun dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi China yang mampu tumbuh 8 persen per tahun dengan jumlah penduduk 1,28 miliar jiwa. The Rise of China juga ditandai menguatnya ekspor yang berpengaruh terhadap surplus ekonomi China. Cadangan devisa China dari yang awalnya hanya mencapai US\$ 291 miliar pada 2002 menjadi US\$ 987,9 miliar pada 2006. Data IMF pada 2014 juga mencatat bahwa China berhasil melampaui AS dalam kontribusinya terhadap PDB dunia yang mencapai 17 persen, sementara AS hanya 16 persen (Kamrany, Jiang, 2016).

Upaya China dalam mengukuhkan dominasi ekonominya sejak tahun 2013 diperkuat dengan agenda ambisiusnya yang disebut dengan OBOR (One Belt One Road). Inilah faktor eksternal kedua yang mendorong kedekatan Indonesia dengan China. Dengan agenda OBOR, China memiliki rencana untuk merevitalisasi jalur sutera, jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa, dalam projek pembangunan Silk Economic Road untuk jalur darat, dan 21 Maritime Silk Road untuk jalur laut. Rencana pembangunan projek besar tersebut akan dibayai oleh AIIB, bank i

nfra-struktur yang dipimpin oleh China. Dalam road map Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road, Indonesia termasuk negara yang berada pada jalur sutera maritim yang hendak China kembangkan.

Dari kerangka ini, kepentingan China di Indonesia sangat jelas, yakni menjadikan Indonesia sebagai bagian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan jalur sutera maritim China. Faktor eksternal ketiga yang mempengaruhi mendekatnya Indonesia terhadap China adalah kegagalan AS dalam strategi rebalance to Asia. Kebangkitan ekonomi China mengancam posisi AS sebagai kekuatan ekonomi global. Sebagai respon terhadap posisi China yang terus meningkat, AS kemudian mengusung konsep Rebalance To Asia. Konsep Rebalance To Asia yang digagas AS adalah untuk meningkatkan keamanan regional dan kemakmuran ekonomi di kawasan Indo-Asia-Pasifik (Poole, 2017).

Faktor internal terutama sangat dipengaruhi dengan kebutuhan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur. Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi memiliki rencana pembangunan infrastruktur yang sangat ambisius. Anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 sebesar Rp. 4.700 triliun

(Bappenas, 2015). Pemerintah Indonesia tidak dapat membiayai seluruh pembangunan infrastruktur, oleh sebab itu Indonesia membutuhkan investasi asing untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. China dengan program Belt and Road Initiative yang akan memberikan dana bantuan investasi pembangunan infrastruktur, tentunya sangat menarik perhatian Indonesia. Program kereta api cepat (High Speed Train/HST) merupakan salah satu program proyek pendanaan yang mencerminkan agenda OBOR China. Untuk membangun jalur OBOR atau Belt and Road Initiative, China membutuhkan dukungan negara-negara Asian Tiger (Forbes, 2017). Dalam konteks tersebut, China melihat Indonesia sebagai salah satu Asian Tiger yang dapat membantu terbentuknya strategi One Belt and One Road Initiative (Cai, 2017).

Faktor internal selanjutnya adalah faktor idiosinkratik. Idiosinkratik merupakan salah faktor dari kebijakan luar negeri suatu negara yang dibentuk berdasarkan psikologi pemimpin untuk membentuk kebijakan luar negeri tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teoritik James Rosenau, terdapat lima variabel yang mempengaruhi dibentuknya kebijakan luar negeri yaitu, system pemerintahan, masyarakat, aturan dan idiosinkratik (Tayfur, 1994). Di era

Jokowi, Indonesia tampak memiliki kedekatan khusus dengan China.

KESIMPULAN

Adanya kesamaan kepentingan antara Indonesia dan China serta sikap agresifitas dan proaktif China yang kemudian membuat Presiden Joko Widodo memilih China sebagai mitra kerjasama dalam meningkatkan Infrastruktur di Indonesia, yang didukung dengan faktor eksternal dan internal yang memperkuat hubungan China dan Indonesia saat ini. Persinggungan kedua faktor tersebut mendorong kecondongan politik luar negeri Jokowi terhadap China sebagai mitra ekonomi dan pembangunan Infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- “Mengapa Presiden Jokowi Gandeng Investor China,” *Megazine.Com*, <https://parliamentmagazine.co.id/mengapa-presiden-jokowi-gandeng-investor-china/>.
- “Teori Dan Indikator Pembangunan,” *BAPPEDA*, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>.
- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan

- Ekonomi dan Kedaulatan? Indonesian Perspective, 161-179
- Arum Sustrini, Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, dan Alasan, *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerjasama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya>
- Aulia Bella, Infrastruktur adalah, *Dosen.Co.Id*. Diakses dari <https://pakdosen.co.id/infrastruktur-adalah/>
- B.N. Marbun, SH. 1996. *kamus politik*, (Jakarta: Sinar harapan), hal 24.
- Dr. Budiono Kusumohamidjojo. Hubungan Internasional: kerangka Studi Analisis. Jakarta: Binacipta. 1987. Hal. 92.
- Eudia Monica dan Sri Hadi, "Investasi China Dalam Bidang Infrastruktur Di Jawa Barat" Vol 1 (2013): 492, <http://ejournal.hi.xn--fisipunmul-ut6e.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/>.
- Gabriel A Almond, *Pengantar Ilmu Politik* (Jogjakarta: Indie Book Corner)
- J. Frankel, Hubungan Internasional, Jakarta; ANS Sungguh Bersaudara, 1980, hal 102
- Jackson, R., & Sørensen, G., (1999), *Introduction to International Relations*, Oxford University Press.
- Luke Glanville, "How are we to think about the „national interest“?", *Australian Quarterly* Vol.77 No.4 (Juli-Agustus 2005),
- Maksum, A. (2015). Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi. *Andalas Journal of International Studies*, 4 (1), 1-26.
- Mark R. Amstutz, *Internasional Konflik and Cooperation: An Introduction to World Politics* "", Charles W. Kegeley Jr. & Eugene R. Wittkopf. 2003. „*World Politics: Tend and Transformation*"", Dan James N. Rosenau. 1976. „*The Study of Foreign Policy*"", Dalam *Aleksius Jemadu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1995).
- Michella Desri Viollita, "Dampak Peningkatan Ekonomi Indonesia Melalui Deklarasi Kemitraan Strategis Dengan Cina Tahun 2005-2011"

- (Universitas Negri Syarif Hidayatullah, 2013).
- Model Pembiayaan Infrastruktur: Indonesia Dan Negara Lain,” *Biro Riset BUMN Lembaga Management Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia*,
- Muller, Jerry Z., (1993), *Adam Smith in his Time and Ours, Designing the Discent Society*, Maxwell McMillan
- Okta Sari, “Perubahan Kebijakan Kerjasama Indonesia Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Jokowi,” *Vol. 3* (2016).
- Rachmayanti, “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013).”
- Ronapea-fisip16, Konsep Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional, *JURNAL SOH 101*, Diakses dari <http://ronapea-fisip16.web.unair.ac.id>.
- Sistematika Penulisan Research Design, <http://hi.umm.ac.id/files/file/SISTEMATIKA%20PENULISAN%20RESEARCH%20DESIGN.pptx>
- Siti Ruqoyah dan Tasya Paramitha, “Jokowi Ke Beijing Perkuat Hubungan Strategis RI Dan China” (n.d.), https://www.viva.co.id/berita/dunia/606571-jokowi-ke-beijing-perkuat-hubungan-strategis-ri-dan-china?page=all&utm_medium=all-page .
- Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal 16
- Sudrajat, “Mengisi Kemitraan Strategi RI-RRT Dengan Berpartisipasi Pemangku Kepentingan Yang Lebih Luas,” *Dubes LBBP-RI Untuk RRT*.
- Suhendra. (2016, July 18). Hubungan Indonesia-Cina. Retrieved Januari 11, 2022, from [tirto.id: https://tirto.id/hubungan-indonesia-cina-btyh](https://tirto.id/hubungan-indonesia-cina-btyh)
- Vinsensio Dugis, Liberalisme, diakses dari https://www.researchgate.net/profile/VinsensioDugis/publication/321709080_Teori_Hubungan_Internasional_Perspektif-Perspektif_Klasik/links/5a7f16a80f7e9be137c71dbb/Teori-

Hubungan-Internasional-
Perspektif-Perspektif-
Klasik.pdf

Walter, Andrew Wyatt, (1996), “Adam Smith and the Liberal Tradition in International Relations”, dalam, Ian Clark & Iver B. Neumann, *Classical Theories of International Relations*, (eds.), Macmillan Press.

Warjio, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, Dan Ideologi* (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2016).